



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :-----

1. **Mas Edi bin Tangang**, tempat dan tanggal lahir Doping, 24 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Palla-Pallang, Desa tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **Arni binti Ma'gi**, tempat dan tanggal lahir Palla-Pallang, 30 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palla-Pallang, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor: 153/Pdt.P/2019/PA.Mj tanggal 13 September 2019, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam Pada tanggal, 20 Oktober 2017 dilingkungan Palla-Pallang Desa/Kelurahan Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kab.Majene ,Dengan Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ma'gi yang Dinikahkan Oleh Imam Masjid Attaqwa Palla-Pallang bernama Abd.Malik dengan Maskawin berupa Satu Buah Cincin Emas dan seperangkai Alat Shalat tunai dan dihadiri oleh 2 Orang saksi masing-masing bernama **Abdulla.T** dan **Bahtiar**
2. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan Undang-undang, dan tidak pernah

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.---

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu Orang Anak yang masing-masing bernama:

1. Muhammad Malik Alfajar (Umur 1 tahun)

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa maksud Pemohon Isbat Nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan Akta kelahiran Anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq Majelis Hakim yang memeriksa ini berkenan menetapkan sebagai berikut:-----

Primer-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon-----

2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I, Ahmad bin Salang Dengan Pemohon II, Arni binti Ma'gi Yang dilaksanakan pada tanggal, 12 April 2012 di Lingkungan/Dusun Labuang Desa/Kelurahan Laliko, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman.

3. Menetapkan Biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku:-----

Subsider-----

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;--

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama: **Abdullah T bin Tanri Lala**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Dusun Palla-pallang, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 20 Oktober 2017;
 - Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid Attaqwa palla-Pallang, bernama Abd. Malik;
 - Bahwa Ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam ketika ijab kabul dilaksanakan;
 - Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Saksi sendiri dan Bahtiar;
 - Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
 - Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
2. Saksi kedua: **Bahtiar bin Dg. Jumu**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Dusun Palla-pallang, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid Attaqwa palla-Pallang, bernama Abd. Malik;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam ketika ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Saksi sendiri dan Abdullah T;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonan seraya memohon penetapan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita-posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;--

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terurai dalam posita permohonan Pemohon, sehingga fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya itu harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga dengan demikian, maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan, patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon.-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mas Edi bin Tangang**) dengan Pemohon II (**Arni binti Ma'gi**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017 di Dusun Palla-pallang, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1441 Hijriyah oleh Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.-----

Hakim Tunggal,

ttd.

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

ttd.

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)